

Manajemen Komunikasi Bencana Gunung Sinabung 2010 Saat Tanggap Darurat

Puji Lestari, Icha Dwi Putri Br Sembiring
Agung Prabowo, Arif Wibawa, Retno Hendariningrum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Jl. Babarsari No. 2 Yogyakarta 55281
Email: pujilestariginting@yahoo.co.id

Abstract: *Sinabung eruption in 2010 had led to a sense of trauma for Karo's District residents, especially the refugees. Disaster relief emergency response was needed in a disaster. This study aims to describe the implementation of disaster communication management at Sinabung in 2010, obstacles of disaster management, and finding alternative of disaster communication management strategy, especially during emergency response. The results indicate the importance of coordination and communication between parties related to disaster communication management. Several problems discovered force the needs for the application of disaster communication management system, especially during emergency response in order to minimize disaster risks.*

Keyword: *communication, disaster, emergency response, management.*

Abstrak: *Letusan Gunung Sinabung 2010 telah menyebabkan rasa trauma bagi warga Kabupaten Karo, khususnya para pengungsi. Penanggulangan bencana saat tanggap darurat sangat diperlukan dalam sebuah bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi manajemen komunikasi bencana di Sinabung 2010, hambatan penanganan bencana, dan menemukan alternatif strategi manajemen komunikasi bencana khususnya saat tanggap darurat. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan komunikasi antarpihak terkait manajemen komunikasi bencana. Beberapa persoalan yang ditemukan mendorong perlunya penerapan sistem manajemen komunikasi bencana khususnya dalam keadaan tanggap darurat untuk dapat mengurangi resiko bencana.*

Kata kunci: *bencana, komunikasi, manajemen, tanggap darurat.*

Bencana merupakan salah satu bagian dalam kehidupan manusia yang datang tanpa diduga. Bencana selalu menimbulkan dampak buruk bagi manusia yang menjadi korban. Memahami bencana menjadi suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu agar dapat tanggap dan mengetahui langkah yang harus dilakukan saat bencana datang.

Menurut *International Strategy for Disaster Reduction—United Nations* (Paripurno, 2008, h. 9) bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian

suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.

Beberapa bencana alam yang sering melanda Indonesia antara lain gempa, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan longsor. Mengingat Indonesia masuk ke dalam daerah rawan bencana, maka

pemerintah mengeluarkan produk hukum yang berkaitan dengan bencana berupa undang-undang hingga beberapa peraturan terkait dengan bencana.

Berbagai produk aturan dalam menghadapi bencana telah dibuat tetapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai kekurangan dalam praktik penanggulangan bencana. Salah satu contoh praktek manajemen komunikasi bencana yang belum maksimal dapat dilihat pada peristiwa bencana gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puji Lestari, Susilastuti, dan Retno Hendariningrum, ditemukan adanya konflik di masyarakat level bawah (para korban) sampai di level pemerintah pusat. Sumber konflik ada bermacam-macam, mulai dari pembagian bantuan saat tanggap darurat sampai rekonstruksi dan rehabilitasi. Jenis konflik yang terjadi bermacam-macam, yaitu konflik intrapersonal (stres), antarkelompok (antarrelawan, antar- pendonor, pemerintah versus LSM, pemerintah versus pemerintah), masalah kebijakan, dan kasus korupsi dana bantuan gempa (Lestari Puji, Susilastuti, dan Retno Hendariningrum, 2009, h. 73-96).

Proses tanggap darurat pada banyak peristiwa bencana alam di Indonesia dalam prakteknya tidak berjalan dengan segera dan terkesan lambat. Koordinasi dari pemerintah kepada masyarakat kacau balau. *Miscommunication* yang berlangsung mendatangkan persoalan baru, seperti konflik, ketidakpercayaan publik, bahkan adu fisik antar pihak-pihak yang terlibat.

Pada saat tanggap darurat sering terjadi kebutuhan para korban bencana alam tidak dapat terdistribusi dengan baik. Ketika terjadi bencana jalur akses berbagai informasi mengenai bencana sering sulit untuk diperoleh. Hal ini juga menjadi salah satu kelemahan dalam proses penanganan bencana di Indonesia.

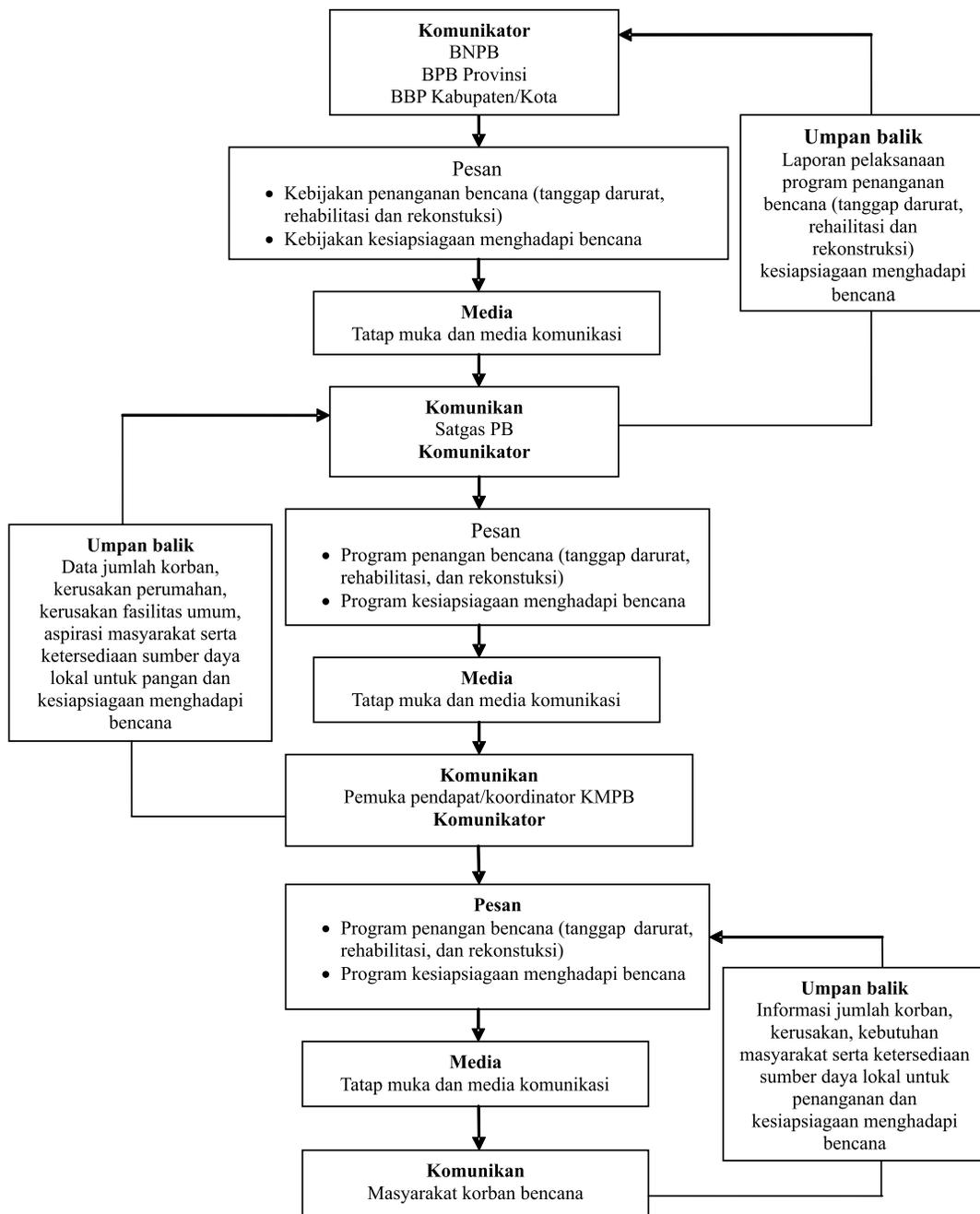
Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba merumuskan permasalahan “Bagaimana manajemen komunikasi bencana yang berlangsung saat tanggap darurat pada bencana Gunung Sinabung 2010, Kabupaten Karo, Sumatera Utara?”, mengingat bencana Gunung Sinabung 2010 merupakan kejadian pertama bagi masyarakat Tanah Karo dan sekitarnya setelah 400 tahun tidak meletus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen komunikasi bencana saat tanggap darurat pada bencana Gunung Sinabung 2010, kendala-kendala yang dialami, dan strategi alternatif dalam pelaksanaan komunikasi bencana khususnya pada saat tanggap darurat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Manajemen bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada, sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi orang-perorangan atau komunitas yang berisiko terkena bencana untuk menghindari, mengendalikan risiko, mengurangi, menanggulangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana (Paripurno, 2008, h. 33).

Manajemen komunikasi bencana melibatkan perencanaan, pengorganisasian atau koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Keterlibatan dan koordinasi antar pihak pemerintah, lembaga berwenang, masyarakat, LSM, donatur dan relawan dalam manajemen komunikasi bencana sangat dibutuhkan guna membangun suatu

komunikasi bencana yang dapat dipahami makna pesannya sehingga menghasilkan umpan balik yang diharapkan berdasarkan tujuan pesan yang disampaikan. Gambar 1. berikut ini menunjukkan Manajemen Komunikasi Bencana yang didasarkan dari Badri (2008, h. 101).



Gambar 1 Manajemen Komunikasi Bencana

Sumber: Badri (2008, h. 101)

Sebagaimana yang digambarkan oleh Badri dalam gambar 1 tersebut manajemen komunikasi bencana tidak hanya sebatas menyampaikan sebuah pesan atau informasi, tetapi berlangsung pula umpan balik yang diharapkan dari pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikannya.

Kajian mengenai manajemen bencana digunakan untuk dapat mengamati serta mencermati praktek manajemen bencana yang diterapkan dalam suatu peristiwa bencana yang terjadi pada bencana Gunung Sinabung 2010. Melalui kajian ini dapat dilihat pemahaman dan pengetahuan para pihak terkait penanganan bencana yang terjadi dan dapat ditemukan kendala dan solusi yang tepat dalam menerapkan manajemen bencana yang efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, interpretatif, evaluatif. Deskriptif di sini bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis (Moleong, 2006, h. 6), sedangkan interpretatif ditempatkan sebagai cara atau jalan dalam memetakan gambaran atau lukisan yang terproyeksi secara sistematis. Melalui

cara ini peneliti dapat membuat gambaran interpretasi dalam mendeskripsikan data yang ada dalam penelitian. Penelitian ini menyajikan data yang merupakan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen komunikasi bencana Gunung Sinabung yang terjadi pada akhir tahun 2010. Dari hasil deskripsi, dirumuskan model alternatif untuk pengelolaan (manajemen) komunikasi bencana Sinabung Tanah Karo, terutama saat tanggap darurat agar dapat mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi para korban.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan bencana Gunung Sinabung 2010. Objek dari penelitian ini yaitu terkait dengan manajemen komunikasi bencana Sinabung 2010. Subjek dan objek ditentukan berdasarkan *purposive sampling* yakni seleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Kriyantono, 2007, h. 54).

Pemilihan subjek penelitian disesuaikan dengan keperluan penelitian berkaitan dengan kedalaman informasi. Adapun kriteria dalam pemilihan subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Karakteristik Subjek Penelitian

Subjek Penelitian	Karakteristik
Personel di Dinas atau Instansi	Terlibat dalam tim penanggulangan bencana Gunung Sinabung 2010; dinas yang bergerak dalam hal kesehatan, penyaluran bantuan, kegunungapian, bencana, dan informasi; individu yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana Gunung Sinabung 2010 yang mewakili dinas terkait, sehingga memiliki wawasan yang luas mengenai bencana Gunung Sinabung 2010 (Dinas Kesbanglinmas, Pendapatan, Infokom dan PDE, Dinas Sosial, Tagana, BNPB, pendonor, relawan, wartawan)
Wilayah	Daerah terparah yang ditetapkan oleh BMGK (Kecamatan Sukameriah)
Warga	Warga yang bermukim di daerah yang terkena dampak terparah dalam bencana Gunung Sinabung 2010; warga ikut mengungsi (Kecamatan Sukameriah).

Data primer dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Dinas Kesbanglinmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat) Kabupaten Karo, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Seksi Urusan Bencana di Dinas Sosial, dan Kepala Dinas INFOKOM dan PDE. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan staf Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pengurus dan anggota Tagana Kabupaten Karo, perwakilan LSM, pendonor, relawan, wartawan, dan korban bencana Tanah Karo guna memperoleh informasi mengenai pengelolaan atau manajemen komunikasi bencana saat tanggap darurat yang pernah dilakukan.

Selanjutnya dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan subjek penelitian sebagai berikut: (1) Sekretaris Dinas Sosial selaku koordinator urusan pengungsi di lapangan, (2) Koordinator Bantuan dari Dinas Pendapatan, (3) Perwakilan dari Dinas Kesbanglinmas, (4) Perwakilan dari Dinas INFOKOM dan PDE, (5) Ketua dan Anggota Tagana sebagai relawan, (6) Perwakilan Pendonor, (7) Perwakilan Komunitas Relawan (di Kabupaten Karo namanya Tagana), (8) Perwakilan Korban Bencana.

Data yang dikumpulkan melalui FGD meliputi antara lain: (1) Pengalaman yang pernah dilakukan oleh para peserta dalam mengikuti berbagai program pengelolaan bencana Sinabung 2010, (2) Kendala-kendala yang dialami selama terlibat dalam pengelolaan bencana Sinabung 2010, (3) Tanggapan mengenai

pengelolaan bencana Sinabung tahun 2010, (4) Masukan tentang manajemen komunikasi bencana di Sinabung 2010.

Sementara itu data sekunder dihimpun dari beberapa sumber tertulis sebagai berikut: (1) Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Bencana Sinabung di Tanah Karo Sumatera Utara, (2) Laporan kegiatan advokasi manajemen komunikasi Bencana dari LSM, (3) Dokumentasi foto-foto bencana Sinabung 2010, (4) Artikel-artikel di koran dan internet.

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Penyajian keseluruhan data, (2) Proses reduksi data, pemilihan data yang relevan dan yang tidak relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti, (3) Pembuatan kategorisasi, (4) Interpretasi dan simpulan hasil penelitian, diperoleh gambaran mengenai kendala-kendala manajemen komunikasi bencana dan analisis atas kendala-kendala tersebut, (5) Perumusan kebijakan berupa model manajemen komunikasi bencana di daerah bencana letusan gunung berapi.

HASIL

Bencana alam terjadi tanpa dapat diduga kapan terjadinya. Begitu juga dengan bencana Gunung Sinabung 2010 yang pada tanggal 27 Agustus 2010 sudah menunjukkan tanda-tanda tetapi belum memperlihatkan peningkatan aktivitas. Pada 29 Agustus 2010 pukul 00.10 WIB dini hari Gunung Sinabung meletus dan mengeluarkan lahar panas. Melihat pentingnya manajemen komunikasi

bencana saat tanggap darurat, penulis menganalisis pelaksanaan manajemen komunikasi bencana pada bencana Gunung Sinabung 2010 Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Proses Manajemen Komunikasi Bencana Saat Tanggap Darurat

Tahapan suatu manajemen komunikasi bencana bertujuan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman. Manajemen komunikasi bencana dibangun dengan koordinasi berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Pelaksanaan manajemen komunikasi bencana terdiri dari perencanaan, pengorganisasian atau koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Perencanaan Manajemen Komunikasi Bencana

Perencanaan pada dasarnya dilakukan jauh sebelum suatu kegiatan berlangsung. Perencanaan dibuat untuk dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan yang diharapkan. Perencanaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan manajemen komunikasi bencana. Perencanaan dibuat sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan manajemen komunikasi bencana.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, pelaksanaan manajemen komunikasi bencana pada bencana Gunung Sinabung 2010 tidak didahului dengan perencanaan. Hal ini karena letusan Gunung Sinabung 2010 tidak terprediksi sebelumnya. Bencana yang terjadi secara tiba-tiba mendorong pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo segera mengambil tindakan cepat saat peristiwa terjadi tanpa ada perencanaan terdahulu. Tindakan cepat yang dilakukan pemerintah berdasarkan arahan Bupati Karo saat itu adalah mengevakuasi warga sekitar lereng Gunung Sinabung dengan melibatkan dinas-dinas yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Karo, TNI, dan kepolisian.

Komunikasi yang dilakukan oleh Bupati Karo kepada Sekda Kabupaten Karo saat itu menghasilkan keputusan evakuasi warga penduduk desa yang bermukim dan beraktivitas dalam radius 6 km dari kawah aktif Gunung Sinabung. Desa-desa yang termasuk dalam radius 6 km dari Gunung Sinabung yang diungsikan, dapat dilihat pada tabel2.

Tabel 2 Daftar Desa Radius 6 km

No	Kecamatan	Desa
1.	Kecamatan Namanteran	Desa Kutabelin, Desa Kutarakyat, Desa Kuta Gugung, Desa Sigarang-Garang, Desa Sukanalu, Desa Simacem, Desa Bekerah, Desa Naman, dan Desa Kuta Tonggal
2.	Kecamatan Simpang Empat	Desa Torong, Desa Gamber, Desa Kuta Tengah, Desa Berastepu, Desa Pintu Besi, Desa Tigapancur, dan Desa Jeraya
3.	Kecamatan Payung	Desa Suka Meriah, Desa Gurukinayan, Desa Selandi, Desa Payung, Desa Ujung Payung, dan Desa Cimbang
4.	Kecamatan Tiganderket	Desa Perbaji, Desa Tiganderket, Desa Temburun, Desa Mardinding, Desa Kutambaru, Desa Tanjung Merawa, dan Desa Susuk

Sumber: Badan Kesbanglinmas Kabupaten Karo 2010

Evakuasi warga yang dilakukan oleh Pemkab Karo sebagai suatu tindakan cepat menunjukkan bahwa penyampaian pesan komunikasi yang dilakukan bersifat satu arah atau *top-down*. Komunikasi satu arah atau *top-down* menunjukkan pesan komunikasi bersifat dari pihak atas dan disampaikan kepada pihak-pihak di bawahnya. Hal itu telah menimbulkan *miscommunication* di antara pemerintah sebagai komunikator dengan warga desa yang dievakuasi sebagai komunikan. *Miscommunication* ini terjadi akibat pesan yang disampaikan terlambat diterima oleh target komunikasi. Pada akhirnya menyebabkan proses evakuasi yang dilakukan tidak berlangsung dengan optimal.

Manajemen komunikasi bencana yang dilakukan tanpa ada perencanaan sebelumnya menyebabkan dalam proses evakuasi banyak warga yang terpencar karena lokasi pengungsian yang tidak ditetapkan berdasarkan asal desa atau berdasarkan kategori tertentu. Hal ini menimbulkan masalah baru yang membuat kepala desa harus melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat pengungsian untuk mengetahui keberadaan warga desanya.

2. Pengorganisasian Manajemen Komunikasi Bencana

Pengorganisasian dalam manajemen komunikasi bencana erat kaitannya dengan pembentukan tim yang terdiri dari pihak-pihak yang memiliki tugas dan fungsi serta bertanggung jawab dalam pengelolaan bencana yang terjadi. Pengorganisasian melibatkan berbagai pihak dengan pemilihan yang tepat.

Di Kabupaten Karo, penanganan bencana belum sesuai Undang-Undang yang mengatur bencana, yaitu diorganisir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Kabupaten. Pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh BPBD tingkat Provinsi Sumatera Utara. Tim penanggulangan bencana dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok yang bertugas menangani bencana yang timbul guna mengurangi resiko yang dialami para korban bencana. Tim penanggulangan bencana selain BNPB, BPBD Provinsi juga terdiri dari tim gabungan dari pihak Pemkab (Dinas Kesbanglinmas, Sosial, Pendapatan, Infokom dan PDE) perangkat keamanan daerah (TNI-Polri), warga masyarakat, dan unsur lain. Tim penanggulangan bencana ini baru terbentuk setelah terjadi bencana. Hal ini terjadi karena Pemkab Karo tidak pernah melakukan prediksi meletusnya Gunung Sinabung yang sudah lama tidak aktif (meletus sekitar 400 tahun yang lalu).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan saat bencana Gunung Sinabung tidak ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tidak ada tim penanggulangan bencana yang siap segera untuk menangani bencana yang terjadi. Ketiadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim penanggulangan bencana mendorong Bupati Karo untuk membentuk tim penanggulangan bencana Gunung Sinabung 2010 dalam keadaan darurat dengan melibatkan dinas-dinas yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Karo.

Berdasarkan Keputusan Bupati Karo No. 800/174/Kesbang/Tahun 2010 tanggal

31 Agustus 2010 telah dibentuk Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Bencana Gunung Sinabung. Keputusan Bupati Karo tersebut diubah untuk menyempurnakan struktur dan fungsi Satuan Tugas Personil. Bupati Karo kemudian mengeluarkan Keputusan Bupati Karo No. 800/186/Kesbang/Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Keputusan Bupati Karo No. 800/174/Kesbang/Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Gunung Sinabung.

Tim penanggulangan bencana ini dibentuk dengan terlebih dahulu dilakukan komunikasi antara Bupati Karo, Sekda Kabupaten Karo, seluruh Kepala Dinas di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Karo, dan pihak TNI/POLRI. Keterlibatan pihak-pihak yang masuk dalam tim penanggulangan bencana Sinabung berdasarkan musyawarah dan terdapat tugas yang dilaksanakan oleh setiap satuan tugas yang terlibat dalam tim penanggulangan bencana Gunung Sinabung 2010.

Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Gunung Sinabung 2010 dilakukan dengan cepat oleh Pemkab Karo. Bupati Karo ditetapkan sebagai penanggungjawab yang diharapkan segala tugas dan perintah dapat dilaksanakan oleh tim penanggulangan bencana dengan maksimal. Pemkab Karo berupaya untuk dapat melaksanakan proses tanggap darurat dengan efektif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang

terlibat dalam tim penanggulangan bencana Gunung Sinabung 2010.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh Tim Penanggulangan Bencana Gunung Sinabung 2010 memiliki sistem manajemen rencana di dalamnya. Pemberitahuan tambahan tugas atau informasi lain disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE Kabupaten Karo yang bertugas dalam hal penginformasian. Segala informasi yang ada disebarkan oleh pihak Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE Kabupaten Karo kepada pihak yang menjadi sasaran penyebaran informasi.

SOP (*standart operational procedure*) dalam penanganan bencana Gunung Sinabung 2010 memang tidak ada, tetapi masing-masing pihak yang terlibat mengetahui tugas dan tanggung jawab sesuai bagiannya. Selain tim penanggulangan bencana Gunung Sinabung, pihak relawan juga membentuk tim penanggulangan bencana Gunung Sinabung 2010. Salah satunya adalah Tim Pelayanan Bencana Letusan Gunung Sinabung yang merupakan perwakilan Moderamen Kabanjahe.

Tim penanggulangan bencana Gunung Sinabung dari pihak Moderamen GBKP melakukan komunikasi dengan seluruh gereja cabang GBKP dan gereja lainnya yang ingin ikut membantu dalam penanggulangan bencana Gunung Sinabung. Tim penanggulangan bencana dari pihak Moderamen GBKP terdiri dari berbagai kalangan, yaitu orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak juga ada yang terlibat dalam pelayanan yang dilakukan.

Tim penanggulangan bencana pemerintah dibentuk dalam keadaan bencana telah terjadi dan dikeluarkan surat Keputusan Bupati Karo dalam hal tersebut yang mengatur tugas dan tanggung jawab tim. Pemerintah terkesan memiliki inisiatif dalam mengurangi resiko yang kemungkinan muncul atas bencana yang terjadi.

Pada saat pembentukan tim penanggulangan bencana Gunung Sinabung 2010, pengorganisasian dalam manajemen komunikasi bencana dilakukan sesegera mungkin setelah bencana Gunung Sinabung 2010 terjadi. Di dalam pengorganisasian manajemen komunikasi bencana ini kurang terbangun komunikasi dua arah, antara pihak Pemkab Karo dengan seluruh kepala Dinas yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Karo. Komunikasi yang dilakukan terkesan *semrawut* atau kurang terarah secara baik, sehingga membuat pesan yang dimaksud dimaknai secara berbeda di antara pihak yang terlibat.

Berdasarkan komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pemkab Karo dengan seluruh kepala Dinas maka dibuatlah keputusan Bupati Karo yang melibatkan seluruh SKPD yang ada karena tim penanggulangan bencana yang bekerja khusus dalam bencana belum terbentuk ketika bencana terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengorganisasian dalam manajemen komunikasi bencana Gunung Sinabung 2010 menghasilkan suatu sistem pengorganisasian yang kurang baik.

Penggunaan *media center* Kabupaten Karo sebagai media dalam penyebarluasan

pesan yang memuat tugas, tambahan tugas, dan berbagai informasi mengenai bencana Gunung Sinabung 2010 membantu pihak terkait yaitu tim penanggulangan bencana Gunung Sinabung 2010 untuk dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Melalui *media center* yang digunakan dapat menunjukkan suatu pesan yang dapat dipercaya, cepat, dan akurat yang dipublikasikan oleh pihak yang bertugas. Informasi yang dapat dipercaya dan akurat dapat mendorong terjadinya praktik kerja yang optimal dan menghindari terjadinya *miscommunication*. Hal ini menunjukkan bahwa media memegang peranan penting dalam penanggulangan bencana. Dalam prakteknya, informasi-informasi tentang data korban, jumlah bantuan, dan lain-lain, tidak diperbolehkan dipublikasikan melalui internet. Hal ini mengindikasikan adanya informasi yang belum sepenuhnya terbuka ke publik.

Selain tim penanggulangan bencana yang dibentuk pemerintah, masyarakat yang terbentuk dalam suatu tim khusus yang bertindak sebagai relawan juga turut serta membantu menjadi tim penanggulangan bencana Gunung Sinabung 2010. Pihak relawan menjalin komunikasi dua arah sehingga membangun suatu komunikasi yang timbal balik yang mempermudah terciptanya kesamaan makna dalam manajemen komunikasi bencana yang dilakukan. Berdasarkan hasil FGD, banyak relawan dari Tagana merasa bingung, harus menurut komando siapa, karena garis komando kurang jelas, ada BNPB, BPBD Provinsi, dan Bupati Karo.

3. Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Bencana

Seluruh pelaksanaan dalam manajemen komunikasi bencana dilakukan berdasarkan pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam tim penanggulangan bencana. Pelaksanaan yang berpedoman pada peran fungsinya diharapkan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan dan menghindari resiko yang muncul.

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan para warga yang menjadi korban dalam bencana Gunung Sinabung 2010, pihak tim penanggulangan bencana Sinabung membentuk personil khusus sesuai Surat Keputusan Bupati Karo yang terdiri dari petugas dapur tempat penampungan pengungsi, petugas penyuplai air bersih, petugas pengadaan konsumsi kebutuhan posko Kantor Bupati, petugas pengangkutan sampah dan tinja, petugas tempat pengungsi di setiap tempat pengungsian yang tersebar di kota Kabanjahe dan Berastagi, dan tim kesehatan (Surat Keputusan Bupati Karo, 2010, h. 8-21).

Seluruh tim penanggulangan bencana Sinabung 2010 ini merupakan pegawai di jajaran SKPD Kabupaten Karo. Beberapa tempat pengungsian yang ada merupakan bagian dari bantuan yang diberikan relawan. Salah satunya dari pihak Moderamen GBKP yang membuka gedung serba guna di berbagai gereja, sentrum. KWK Kabanjahe dan Berastagi dibuka sebagai tempat pengungsian sebagai langkah awal dalam membantu para korban bencana Sinabung.

Guna memenuhi penyediaan makanan, di hari pertama pengungsian para pengungsi mendapatkan makanan yang disediakan dan dimasak oleh pihak pemerintah dibantu oleh warga sekitar tempat pengungsian. Pada hari berikutnya para pengungsi yang secara bergantian memasak berdasarkan jadwal yang dibuat oleh pengurus di tempat pengungsian. Pembagian tugas untuk menyiapkan konsumsi di pagi, siang dan malam hari disiapkan oleh pengungsi sendiri yang bekerja sama dengan pengungsi lain yang berasal dari desa yang sama. Jadwal memasak yang dibuat oleh pihak panitia disesuaikan dengan asal desa pengungsi.

Tim kesehatan yang ditugaskan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karo melakukan kerja sama dengan rumah sakit yang ada di sekitar kota Kabanjahe dan Berastagi. Dinas Kesehatan menugaskan seluruh pegawai puskesmas, dokter, bidan, perawat, dan lainnya untuk mendirikan posko kesehatan di setiap tempat pengungsian. Pihak Dinas Kesehatan juga mendirikan posko-posko kesehatan yang tersebar di setiap tempat pengungsian dan menyediakan ambulan. Di setiap posko kesehatan yang tersebar terdapat tenaga medis, perawat, dan obat-obatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, diketahui bahwa saat bencana terjadi penyakit yang sering menyerang para pengungsi seperti flu, sakit perut, dan batuk. Penyakit infeksi saluran pernafasan (ISPA) dan konjungtivitas merupakan penyakit yang banyak menyerang pengungsi usia

kurang dari 5 tahun. Sedangkan untuk pengungsi usia lima tahun ke atas banyak terserang penyakit anxietas, ISPA, konjungtivitas, gastritis dan hipertensi (Data Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, 2010).

Guna menjaga dan membantu pengungsi selama di pengungsian para donatur serta relawan banyak yang memberikan bantuan obat-obatan, makanan, selimut dan lain-lain kepada pengungsi. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti dari Kesbang Kabupaten Karo dan Moderamen GBKP menunjukkan bahwa donatur yang lain juga memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan para korban seperti beras, air mineral, obat, sayur mayur, dan lauk pauk.

Sementara itu pemerintah atau tim penanggulangan bencana merasa kewalahan dalam pemenuhan air bersih dan sanitasi karena di tempat pengungsian yang lebih banyak merupakan *jambur* (bangunan yang digunakan untuk acara suka cita maupun duka cita) tersebut hanya tersedia MCK (Mandi Cuci Kakus) dalam jumlah terbatas. Hal ini membuat para pengungsi selalu berlomba dalam menggunakan MCK yang tersedia. Kurangnya sanitasi membuat warga harus antri dan terkadang berdesakan untuk menggunakan kamar mandi yang tersedia dalam jumlah terbatas. Hal ini menjadi permasalahan bagi pemenuhan kebutuhan para pengungsi karena sanitasi dan air bersih merupakan hal penting yang digunakan setiap hari. Selain itu sanitasi yang kurang baik juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit seperti gatal-gatal dan sakit perut.

Selama di pengungsian pihak pemerintah dan tim penanggulangan bencana Sinabung 2010 memberikan hiburan, bimbingan secara rohani, dan sosialisasi bencana kepada para pengungsi. Hiburan yang diberikan merupakan bentuk pelayanan secara psikososial untuk menghindari trauma berkepanjangan bagi para pengungsi. Banyak korban bencana Sinabung yang trauma. Berkenaan dengan penanganan trauma ini pihak relawan dan donatur juga melakukan hiburan, seperti yang dilakukan oleh pihak sekolah, gereja, tokoh agama, masjid dan bahkan dengan mengundang tokoh atau artis daerah untuk membuat para pengungsi dapat tertawa dan melupakan bencana yang datang.

Pihak Pemkab Karo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Karo membuka beberapa sekolah yang bebas untuk menjadi sarana belajar bagi anak-anak yang mengungsi. Hal ini juga merupakan salah satu langkah yang digunakan agar anak-anak yang mengungsi merasakan hari-hari seperti biasanya walaupun sedang mengungsi. Bimbingan rohani berdasarkan agama dan keyakinan guna menguatkan para pengungsi juga diberikan.

Manajemen komunikasi bencana saat tanggap darurat yang dilakukan oleh pihak Pemkab Karo dan Tim Penanggulangan Bencana Sinabung 2010 menunjukkan bahwa pihak terkait belum optimal melakukan pemenuhan kebutuhan para pengungsi baik dari segi makanan, kesehatan, sandang, tempat, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Komunikasi yang terjadi belum bersinergi di antara seluruh unsur komunikasi yang ada. Bila salah satu unsur yang ada tidak efektif maka menimbulkan gangguan pada komunikasi yang dilakukan. Salah satu unsur komunikasi adalah pesan dan melalui pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan diharapkan munculnya suatu *feedback* atau umpan balik atas pesan tersebut.

Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh tim penanggulangan bencana Gunung Sinabung 2010 yang dibentuk oleh pihak pemerintah menunjukkan kurang terbangunnya komunikasi dua arah atau timbal balik diantara pihak yang terlibat. Komunikasi yang dilakukan cenderung seadanya. Komunikasi dua arah dalam pelaksanaan manajemen komunikasi bencana tidak seutuhnya berjalan dengan baik, karena terjadi perbedaan pemaknaan pesan diantara pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Ketidaksamaan makna pesan ini akhirnya menimbulkan gangguan dalam pelaksanaan kerja, misalnya kesalahan dalam pembagian makanan.

Di sisi lain komunikasi dua arah yang dibangun oleh tim penanggulangan bencana Gunung Sinabung 2010 yang dibentuk oleh pemerintah telah membantu tim untuk dapat saling berkoordinasi dalam memenuhi kebutuhan korban bencana. Komunikasi ini dilakukan dengan adanya pemeriksaan di lapangan yang dilakukan dan adanya laporan situasi yang terjadi, kendala yang ada, serta kebutuhan yang ada. Berdasarkan komunikasi yang dilakukan

melalui rapat yang dilakukan pada pagi dan sore hari, pihak terkait mengetahui tindakan yang harus dilakukan pada keesokan harinya guna menyelesaikan kendala yang ditemukan di lapangan.

Komunikasi dua arah juga terjadi antara pihak tim kesehatan dengan para pengungsi. Komunikasi dua arah ini membentuk pola komunikasi yang menciptakan pengertian masalah (penyakit) yang sedang dialami oleh para pengungsi. Tatap muka langsung yang dilakukan oleh tim kesehatan dalam menyelesaikan persoalan dapat mengurangi bahkan menghilangkan rasa trauma yang dialami para pengungsi.

Tim relawan menggunakan komunikasi timbal balik dengan pihak yang ada dalam tim itu sendiri dan di luar tim untuk mencari donatur dan relawan untuk tim penanggulangan bencana. Komunikasi ini dilakukan baik dengan bertatap muka, melalui telepon, HT maupun melalui media jejaring sosial seperti *Facebook*. Pihak relawan juga mendirikan posko-posko sebagai tempat penyaluran bantuan yang diberikan kepada korban bencana.

Hal yang sama juga dilakukan oleh donatur yang menggunakan media telepon dan media jejaring sosial. Dalam hal ini pihak relawan maupun donatur berpendapat bahwa media jejaring sosial memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan pesan dengan baik. Pesan yang disampaikan dapat diterima oleh pihak lain dan akhirnya ikut memberikan bantuan guna memenuhi kebutuhan para korban bencana.

Korban bencana yang berada di pengungsian melakukan komunikasi

baik dengan pihak koordinator pengurus tempat pengungsian maupun dengan sesama pengungsi lainnya. Komunikasi yang dibangun antara korban dengan pihak koordinator tempat pengungsian bersifat dua arah yang pada akhirnya menciptakan kesamaan makna pesan, walaupun kadang-kadang ada hambatan dan terjadi konflik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen komunikasi bencana saat tanggap darurat di Kabupaten Karo kurang berjalan dengan baik. Kesalahpahaman yang terjadi karena ada beberapa pesan yang tidak dimaknai secara sama oleh pihak yang menjadi target pesan sehingga menimbulkan *feed back* yang berbeda.

Pendanaan dalam proses penanggulangan bencana diperoleh dari pihak pemerintah pusat seperti Presiden RI – yang saat bencana terjadi beberapa saat kemudian mengunjungi para pengungsi dan memberikan bantuan dana melalui Rumah Tangga Kepresidenan dan melalui Menteri Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, pemerintah provinsi –diberikan Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, dan dari berbagai pihak (Data Kesbanglinmas, 2010, h. 6-7).

Pendonor dari kalangan masyarakat juga turut berperan aktif dalam membantu penanggulangan bencana. Pendonor terdiri dari individu dan kelompok. Salah satunya adalah Ikatan Alumni SMPN 1 Kabanjahe Angkatan 88, yang mencari dana dari berbagai pihak termasuk dana pribadi. Dana yang terkumpul diberikan dalam bentuk bantuan kepada warga yang

mengungsi di desa-desa dan masyarakat yang tetap tinggal di desa yang bertugas menjaga desa.

Pihak relawan dari Moderamen GBKP Kabanjahe mendapatkan bantuan dan sumbangan dari hasil kerjasama dengan gereja dan masyarakat lainnya serta pihak-pihak lain yang ingin membantu dalam bencana yang terjadi. Bantuan yang ada dalam bentuk uang diberikan kepada pengungsi dengan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah di tempat pengungsian. Bantuan yang ada juga diturunkan ke desa-desa agar warga desa yang menjadi korban mendapatkan bantuan secara merata.

Pemberian bantuan yang dilakukan oleh pihak donatur dan relawan disesuaikan dengan kebutuhan pengungsi. Pengelolaan bantuan ini sering menghadapi permasalahan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Usaha Purba Kepala Seksi Korban Bencana dan Bantuan Sosial Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Karo. Masalah disebabkan ada sebagian pengungsi yang ingin mendapatkan bantuan yang sama dengan pengungsi yang lain yang tidak berdasarkan tingkat kebutuhan. Selain itu juga terjadi penumpukan bantuan yang disebabkan tingkah laku para pengungsi. Para pengungsi yang disuruh untuk mengungsi memikirkan keadaan ladang, ternak dan harta bendanya di desa sehingga sering kembali ke desa pada pagi hari dan malam hari kembali ke tempat pengungsian.

Warga yang mendapat larangan dari pemerintah untuk meninggalkan tempat

pengungsian sering kali pergi kembali ke desa untuk melihat dan mengamankan ternaknya dan bahkan ada yang kembali ke desa untuk melakukan aktivitas di ladang. Hal yang dilakukan oleh para pengungsi ini mengakibatkan adanya penumpukan bantuan makanan. Pihak panitia menyediakan makanan sesuai dengan jumlah pengungsi yang didata di pagi dan malam hari. Data yang ada menunjukkan bahwa pada malam hari jumlah pengungsi relatif banyak sehingga makanan untuk pagi hari disediakan dalam jumlah yang cukup banyak. Pada pagi hari jumlah pengungsi berkurang karena warga kembali pulang melihat rumah dan ladang yang mengakibatkan makanan menumpuk. Pada pagi dan sore hari selalu terdapat makanan sisa. Pada malam hari makanan yang disediakan sering kurang karena adanya selisih data akibat keadaan tersebut.

Lain halnya dengan bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah dalam bidang lain yang juga dilakukan oleh relawan dan donatur. Bantuan yang sangat banyak menyebabkan bantuan yang ada melebihi kapasitas pengungsi yang ada. Ketika bencana telah lewat bantuan yang diberikan ada yang dibawa pulang warga menghindari terjadinya penumpukan bantuan.

Pada saat tanggap darurat tim penanggulangan bencana sejatinya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam proses pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Bantuan yang tersedia dalam jumlah besar merupakan bukti bahwa bantuan bencana yang diberikan

pihak terkait dalam penanganan bencana Sinabung sudah dapat dikatakan cukup baik. Dalam prakteknya masih terjadi penumpukan bantuan dan kesalahan data yang disebabkan oleh tidak adanya manajemen yang dilakukan sejak awal penanggulangan bencana.

Kesalahan mengenai penyaluran bantuan bukan disebabkan tidak terbangunnya komunikasi dua arah yang baik. Hal itu terjadi karena makna pesan yang ditangkap oleh para pengungsi berbeda dengan makna pesan yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Komunikasi dua arah dalam hal penyaluran bantuan merupakan suatu hal yang penting guna mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh pengungsi dan pesan yang disampaikan dipahami oleh para pengungsi. Ketidaksamaan makna pesan inilah yang menyebabkan para pengungsi menganggap terjadinya ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan, padahal penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan kebutuhan korban bencana.

Penyaluran bantuan yang dilakukan oleh relawan dan donatur dilakukan melalui komunikasi dua arah, yaitu dengan pemeriksaan ke tempat pengungsian dan ke desa-desa. Hal ini dilakukan untuk memahami kebutuhan warga dan melihat kondisi yang terjadi. Melalui komunikasi yang dibangun, pihak relawan dan donatur mengetahui kebutuhan para korban bencana.

4. Evaluasi Manajemen Komunikasi Bencana

Evaluasi yang dilakukan dalam hal ini adalah terhadap manajemen komunikasi bencana dalam tanggap

darurat pada bencana Gunung Sinabung 2010. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan tidak ada evaluasi yang dilakukan pihak terkait yaitu pemerintah terhadap manajemen komunikasi bencana yang dilakukan. Evaluasi yang dilakukan hanya sebatas pada pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan dan dibahas dalam rapat yang dilakukan di sore hari bersama pihak tim penanggulangan bencana yang lain.

Evaluasi yang dilakukan hanya bersifat harian dan tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi sebaiknya dilakukan di akhir kegiatan dengan melibatkan seluruh pihak yang ada dalam tim untuk mengetahui keberhasilan atas kegiatan yang dilaksanakan dan mengetahui kekurangan sebagai bahan untuk dapat bekerja lebih baik di waktu akan datang.

Kendala-kendala Manajemen Komunikasi Bencana Gunung Sinabung

Berbagai kendala dapat muncul akibat beberapa faktor yang tidak diketahui sebelum pelaksanaan kegiatan. Berbagai kendala juga ditemukan dalam penanganan bencana Gunung Sinabung 2010 yang mengakibatkan kurang optimalnya manajemen komunikasi bencana yang dilaksanakan;

1. Tim Penanggulangan Bencana Sinabung yang dibentuk dalam keadaan darurat membuat kerja tim yang bertugas terkesan kaku sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan, baik dalam sistem penyebaran informasi, koordinasi, dan pemahaman komunikasi;

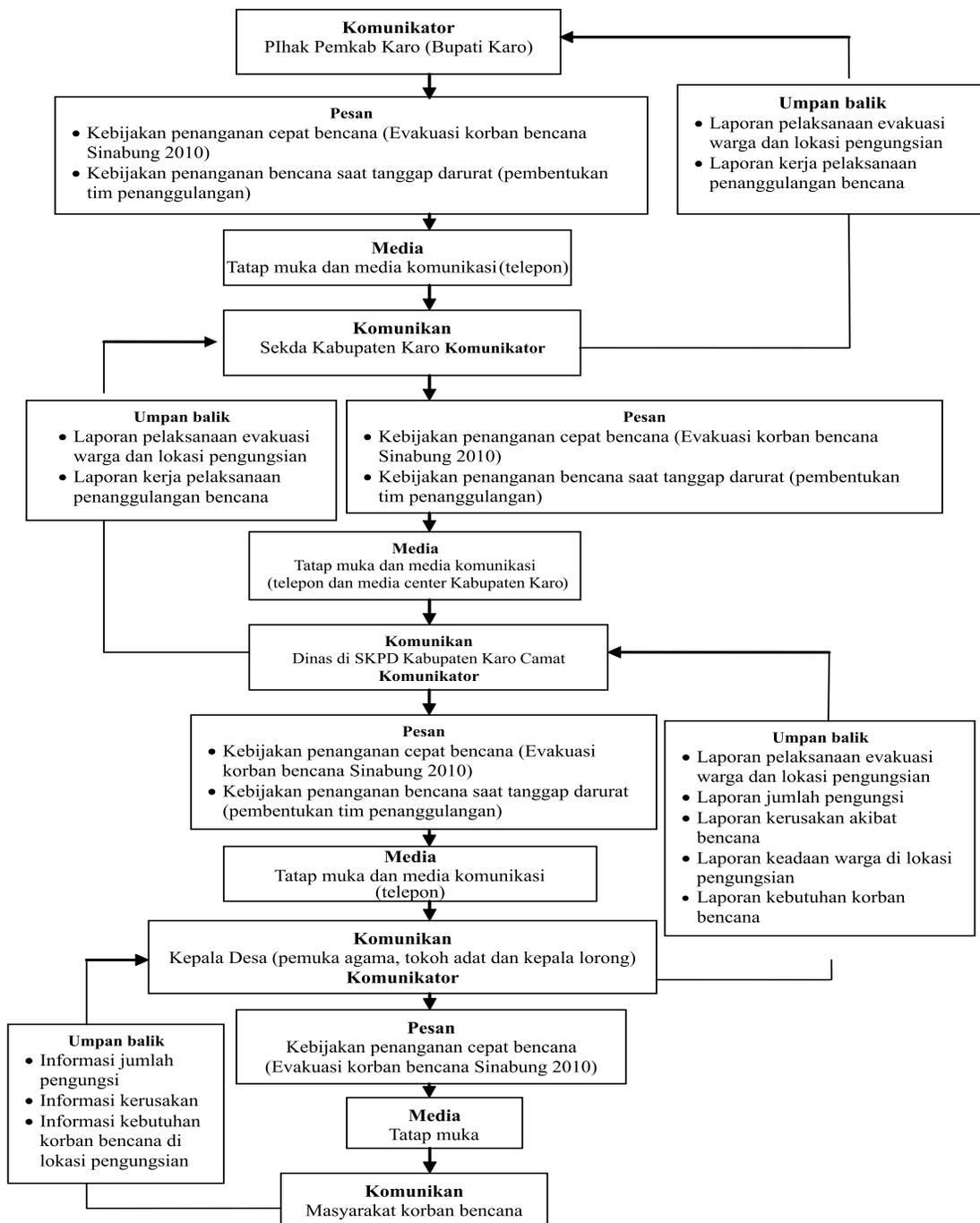
2. Pemantauan dan kesalahan informasi membuat bencana yang terjadi sejak awal sudah memiliki kelemahan di dalamnya yang mengakibatkan penyampaian informasi selanjutnya tidak dipercaya oleh masyarakat. Akibat kesalahan informasi tersebut menimbulkan gangguan psikologis;
3. Sosialisasi yang tidak pernah didapatkan warga sekitar Gunung Sinabung mengakibatkan ketidaktahuan warga dalam bertindak saat bencana datang sehingga saat bencana datang menimbulkan kepanikan yang berakibat beberapa warga terpisah dengan keluarganya;
4. Penyaluran bantuan sudah sesuai kebutuhan, namun keinginan pengungsi akan kesamarataan menimbulkan masalah baru dalam penyaluran bantuan.
5. Sikap pihak berwenang yang kurang tegas membuat warga yang mengungsi lalu lalang untuk pulang kemudian kembali lagi yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penumpukan makanan pada jam tertentu dan menyebabkan kekurangan makanan pada waktu lain.
6. Keadaan jalan yang rusak menghambat proses evakuasi untuk berjalan dengan cepat.

Manajemen komunikasi bencana yang terwujud dalam bencana Gunung Sinabung 2010 tidak sama seperti yang digambarkan oleh Badri. Komunikasi yang berlangsung menunjukkan komunikasi yang bersifat dari atas ke bawah atau satu arah dan ada komunikasi yang bersifat dua arah. Dalam

komunikasi yang bersifat dari atas ke bawah segala informasi hanya disalurkan oleh satu pihak dan pihak lain menjalankan.

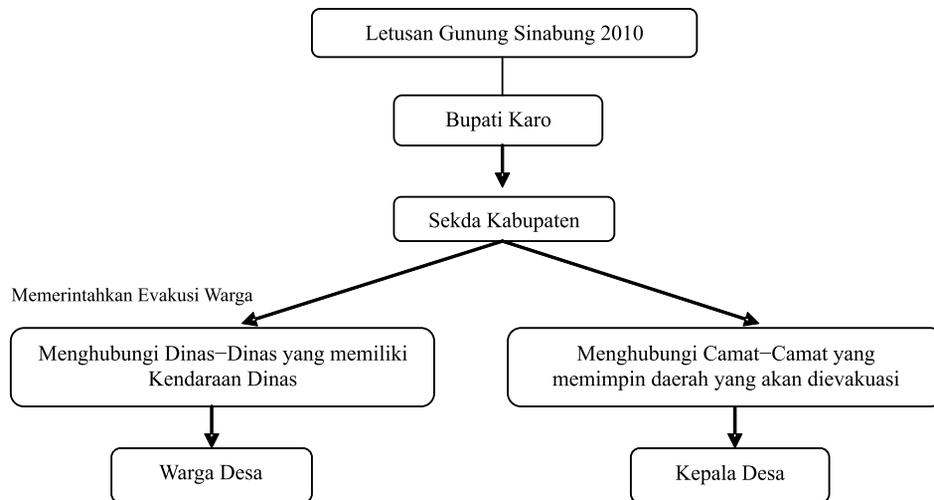
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dan berdasarkan acuan kerangka pemikiran Badri mengenai manajemen komunikasi bencana,

maka manajemen komunikasi bencana pada bencana Gunung Sinabung 2010 dapat digambarkan seperti gambar 2. Terlihat bahwa dalam manajemen komunikasi bencana tersebut proses komunikasi yang berlangsung dari atas ke bawah, yaitu dari pemerintah ke masyarakat.



Gambar 2 Manajemen Komunikasi Bencana Gunung Sinabung 2010

Pola komunikasi dalam evakuasi dapat digambarkan pada gambar 3. sebagai korban bencana Gunung Sinabung 2010 berikut

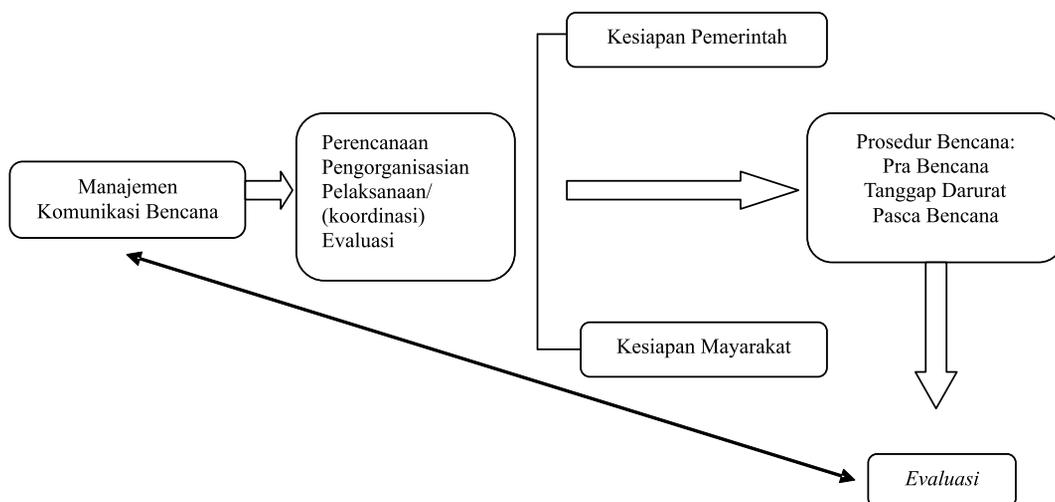


Gambar 3 Pola Komunikasi Bencana Sinabung 2010 Saat Tanggap Darurat

Ketika bencana datang secara tiba-tiba pihak Pemkab Karo yang diwakili oleh Bupati Karo berkomunikasi dengan Sekretaris daerah Kabupaten Karo untuk melakukan proses evakuasi warga. Sekda Kabupaten Karo memerintahkan seluruh dinas yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Karo untuk bekerja sama dalam mengevakuasi

warga dengan menggunakan mobil dinas yang ada dan memberitahukan informasi evakuasi kepada kepala desa. Komunikasi yang belum efektif mengakibatkan proses evakuasi tidak berjalan dengan optimal.

Pola manajemen komunikasi bencana saat tanggap darurat yang ideal berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4 Model Alternatif Manajemen Komunikasi Bencana

Gambar 4 menunjukkan bahwa manajemen komunikasi bencana tidak dapat terjadi begitu saja. Manajemen komunikasi bencana diawali dengan perencanaan sistem manajemen di dalamnya. Identifikasi yang dimaksud adalah dengan menetapkan peta rawan bencana dan kemudian menyusun perencanaan yang menggunakan strategi dalam menghadapi bencana yang datang. Kesiapan pihak yang terlibat di dalamnya juga ikut mendorong keberhasilan manajemen komunikasi bencana yang dilaksanakan. Kesiapan pihak pemerintah dan yang terlibat dalam penanggulangan bencana, dapat dilakukan dengan membuat rencana kontijensi dan mengarahkan agar masyarakat sadar bencana melalui SOP (*standart operational procedure*). Saat bencana datang, pihak yang terlibat mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Saat bencana sudah terjadi maka melewati masa pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Saat bencana sudah berakhir diperlukan evaluasi untuk membangun manajemen komunikasi bencana yang lebih efektif dalam waktu mendatang. Penulis memberikan apresiasi kepada Pemkab Sleman Provinsi DIY yang telah memiliki rencana kontijensi penanganan bencana Merapi 2010. Hasil penelitian Lestari, Agung Prabowo, dan Arif Wibawa (2012, 173-197) memberi inspirasi tentang manajemen komunikasi bencana Merapi 2010 saat tanggap darurat sudah melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang lebih baik dibanding manajemen komunikasi bencana Sinabung 2010. Hal ini terkait dengan

kesiapan pemerintah dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang saling bekerjasama melakukan mitigasi bencana dan manajemen komunikasi bencana berbasis komunitas.

SIMPULAN

Solusi atau strategi yang tepat bagi daerah baru mengenai bencana untuk pertama kalinya seperti Kabupaten Karo, adalah sebagai berikut: (1) Bahwa semua pihak harus saling terlibat dan bekerjasama dalam penanggulangan bencana. Pemerintah harus mampu memetakan ancaman bencana yang ada di sekitar daerahnya, menentukan strategi, dan pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang akan dilakukan. Di samping itu pemerintah harus menentukan jalur evakuasi dan tempat pengungsian bagi warga. (2) Pihak pemerintah harus mampu menyadarkan dan mendidik warga akan bahaya bencana. Penyadaran dan pendidikan terhadap warga ini dapat dilakukan dengan komunikasi dan sosialisasi mitigasi bencana. Masyarakat yang paham tentang bencana yang ada di sekitarnya akan saling bekerjasama dengan pemerintah dan warga lainnya membuat SOP. Di dalam SOP tersebut mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh warga bila bencana datang, terdapat peta evakuasi, tempat pengungsian, standar pengamanan, dan lain-lain. (3) Pihak pemerintah bersama warga saling bekerjasama menentukan kebutuhan yang diperlukan warga dengan melihat kapasitas warga yang ada dalam suatu wilayah.

Dengan adanya penentuan kebutuhan, maka saat bencana datang tidak menimbulkan kekacauan dalam membagikan kebutuhan bagi warga. Penentuan kebutuhan ini tidak hanya sebatas mengenai makanan, tetapi baik dari segi sandang, papan, obat-obatan, kebutuhan psikologis, dan lain sebagainya. (4) Pemerintah membuat sebuah rencana kontijensi untuk setiap ancaman bahaya yang ada. Hal ini merupakan sebuah kunci sukses dalam penanggulangan bencana. Dalam rencana kontijensi ditetapkan pihak yang bertanggungjawab ketika bencana datang, strategi, jalur evakuasi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan bahkan dalam beberapa rencana kontijensi telah ditetapkan perkiraan waktu bencana terjadi serta penanggulangan dalam bencana tersebut. (5) Diharapkan dengan adanya persiapan yang matang baik dari pihak pemerintah, warga, kelompok tertentu seperti LSM dapat menciptakan manajemen komunikasi bencana yang efektif sehingga resiko bencana yang mungkin muncul dapat dikurangi bahkan dihindari. Dengan demikian diharapkan dapat terbangun manajemen komunikasi bencana yang melibatkan komunikator, komunikan, pesan serta umpan balik yang efektif antarpihak yang terlibat sehingga dapat tercipta kesamaan makna pesan dalam proses manajemen komunikasi bencana yang berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Karo. (2010). Data Kurban Sinabung 2010.
- Badri, Muhammad. (2008). *Pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana gempa bumi di Yogyakarta (kasus Kabupaten Bantul)*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. (2010). Data Pengungsi Sinabung 2010.
- Kriyantono, Rachmat. (2007). *Teknis praktis riset komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lestari, Puji. Agung Prabowo, dan Arif Wibawa. (2012). Manajemen Komunikasi bencana Merapi 2010 Saat Tanggap darurat. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 10 Nomor 2, Agustus 2012. Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran". Yogyakarta.
- Lestari, Puji. Rr. Susilastuti DN, dan Retno Hendariningrum. (2009). Manajemen konflik berbasis budaya lokal sebagai upaya meningkatkan jati diri bangsa Indonesia. *Jurnal Ikatan Sarjana Indonesia* Volume I Nomor 1, Oktober 2009 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pariipurno, Eko Teguh. (2008). Manajemen resiko bencana berbasis komunitas: Alternatif dari bawah. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik* Edisi 1 Juni, Tahun II 2008. Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/186/Kesbang/Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Keputusan Bupati Karo No. 800/174/Kesbang/Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Gunung Sinabung.

